



KABUPATEN
PESISIR SELATAN

RENJA

R e n c a n a K e r j a

TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan nikmat Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada unit kerja Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Dokumen Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024 yang mana berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Dokumen ini.

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Painan, 6 Maret 2023

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan



HADI SUSILO / S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 0001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4. Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPEDALITBANG TAHUN LALU	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah	II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 8
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II -11
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD	II -13
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	II -18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III - 1
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Bapedalitbang.....	III - 1
3.3. Program Dan Kegiatan.....	III - 3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	II – 3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	II - 10
Tabel 2.3.	Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	II -12
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II -18
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Bapedalitbang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	III -4
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	IV-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Dokumen Renja Bapedalitbang memberikan gambaran kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dan dikuatkan dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain dari aturan yang mengikat tersebut, maka dalam penyusunan Renja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan juga memperhatikan hal-hal berikut yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2024 berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 . .

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

2. Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventerisasi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238)
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2021-2026
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Bapedalitbang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program /kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapedalitbang tahun 2024. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

- a Pedoman penyusunan RKA Bapedalitbang Tahun 2024
- b Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bapedalitbang Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bapedalitbang Tahun 2024, meliputi :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rumusan dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025.

Bab V Penutup.

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Secara Anggaran APBD dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 senilai Rp. 6.650.191.099,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.362.231.284,-(enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 95,67% atau bisa dikatakan sangat tinggi.

Dalam capaian penilaian kinerja keuangan dapat dikelompokkan menjadi “Sangat Tinggi yaitu capaian berkisar antara 91-100%, “Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 75-90%, “Sedang” yaitu capaian berkisar antara 65-74%, dan “Rendah” yaitu capaian berkisar anantara 50-64% dan “Sangat Rendah” yaitu capaian dibawah 50%. Sedangkan capaian kinerja keuangan Bapedalitbang brada pada level Tinggi yaitu senilai 87%, tapi walaupun demikian hal ini tidak mempengaruhi dari hasil kinerja kegiatan.

Penyusunan Renja Bapedalitbang sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam Penyusunan Renja Bapedalitbang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi saat ini
- b. Sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- c. Tujuan yang dikehendaki dalam menyelesaikan permasalahan;

- d. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- e. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana

Penyusunan Renja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 juga memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

- a Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan kerja tahun anggaran 2024;
- b Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Bapedalitbang, Hal ini dapat dilihat pada table tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 (T.C-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Outcome/Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (=8/7)	10	11 (=6+8+10)	12 (=11/5)
	URUSAN : PEMERINTAHAN WAJIB										
	URUSAN : PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
5.01.	URUSAN PERENCANAAN										
5.01.01.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1. Nilai AKIP Bapedalitbang 2. Nilai RB Bapedalitbang	Nilai Nilai	A 66 (B)	A -	A -	A -	100	A 65 (B)	A 65 (B)	100 100
5.01.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase								
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	22	22	22	22	100	22	66	300
5.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	laporan	20	20	20	20	100	20	60	300
5.01.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase								
5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	(bulan) orang	504	476	476	476	100	504	1456	288,89
5.01.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	(bulan) dokumen	12	12	12	12	100	12	36	300
5.01.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase								

5.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1	1	1	100	1	3	300
5.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	1	1	1	100	1	3	300
5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1	1	1	100	1	3	300
5.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	36	36	36	36	100	36	108	300
5.01.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	(bulan) laporan	12	12	12	12	100	12	36	300
5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	(bulan) laporan	12	12	12	12	100	12	36	300
5.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(bulan) laporan	12	12	12	12	100	12	36	300
5.01.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase								
5.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
5.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	2	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
5.01.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase								
5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	(bulan) laporan	12	12	12	12	100	12	36	300
5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	(bulan) laporan	12	12	12	12	100	12	36	300
5.01.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase								

BAPEDALITBANG – KAB. PESISIR SELATAN

5.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	(bulan) unit	1	0	1	1	100	1	2	200
5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	(bulan) unit	8	8	8	8	100	8	24	300
5.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	(bulan) unit	34	30	34	34	100	34	98	288,24
5.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	(bulan) unit	2	2	2	2	100	2	6	300
5.01.02.	Program : Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai	43,2	-	-	-	#VALUE!	43,2	#VALUE!	#VALUE!
5.01.02.2.01.	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memenuhi standar baik	Persentase								
5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	2	2	2	2	100	2	6	300
5.01.02.2.02.	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	Persentase								
5.01.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen	40	0	15	15	100	40	55	137,5
5.01.02.2.02.02.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	orang	20	0	26	26	100	26	52	200
5.01.02.2.04.	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang melakukan entrian perencanaan dalam aplikasi	Persentase								

5.01.02.2.04.03.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	laporan	4	4	4	4	100	4	12	300
5.01.03.	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai	45	0	0	0	#DIV/0!	43,2	43,2	100
5.01.03.2.01.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah OPD yang berkoordinasi di bawah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah								
5.01.03.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada bidang pemerintahan	laporan	2	0	2	2	100	2	4	200
5.01.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	dokumen	14	0	14	14	100	14	28	200
5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dokumen	8	0	8	8	100	8	16	200
5.01.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada bidang pembangunan manusia	laporan	3	0	3	3	100	3	6	200
5.01.03.2.02.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah OPD yang berkoordinasi dibawah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah								
5.01.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	dokumen	8	0	8	8	100	8	16	200
5.01.03.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada Bidang Perekonomian	laporan	1	0	1	1	100	1	2	200

BAPEDALITBANG – KAB. PESISIR SELATAN

5.01.03.2.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	0	8	8	100	8	16	200
5.01.03.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang SDA	laporan	1	0	1	1	100	1	2	200
5.01.03.2.03.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase program prioritas Renja PD terhadap prioritas RKPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase								
5.01.03.2.03.01.	Koodinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	0	8	8	100	8	16	200
5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada bidang infrastruktur	laporan	1	0	1	1	100	1	2	200
5.01.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	0	8	8	100	8	16	200
5.05.	URUSAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02.	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kebijakan yang searah dengan sasaran RPJMD	%	91,50	-	87	87	100	89,50	89,50	100
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	62,32	-	94,34	94,34	100	60,02	60,02	100
5.05.02.2.01.	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase kajian kelitbangan yang dihasilkan terhadap kebutuhan	Persentase								
5.05.02.2.01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	laporan	2	0	2	2	100	2	4	200
5.05.02.2.04.	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam pelaksanaan inovasi daerah	Jumlah								
5.05.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perakayasaan di bidang teknologi dan inovasi	dokumen	1	0	1	1	100	1	2	200
5.05.02.2.04.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	laporan	1	0	1	1	100	1	2	200

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi daerah yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional, maka Bapedalitbang menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas “.

Dari tujuan tersebut ada empat sasaran strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja.

Dari evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi terhadap 4 komponen SAKIP yaitu :

- a. Perencanaan kinerja
- b. Pengukuran kinerja
- c. Pelaporan kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil penilaian Menpan RB tentang nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja memperoleh bobot 24,15 dari total bobot yang ditetapkan sebesar 30. Dengan bobot pada komponen ini mendorong SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan mendapat skor BB. Dengan demikian berarti sebagian besar

OPD di Pesisir Selatan perencanaannya sudah selaras dengan RPJMD. Akan tetapi masih ada beberapa OPD yang terus memaksakan perencanaan yang disusun dalam rangka memenuhi struktur yang ada. Hal ini adalah faktor yang harus dicermati untuk dirubah pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022 komponen pengukuran kinerja belum menjadi target kinerja dari Baepdalitbang, setelah dilakukan rasionalisasi RPJMD pada akhir tahun 2022 maka mulai tahun 2023 komponen pengukuran kinerja menjadi target kinerja Bapedalitbang dengan Bobot 30%.

2. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja dengan target kinerja nilai Reformasi Birokrasi Bapedalitbang yang baru ditetapkan pada tahun 2023 ini dan Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Bapedalitbang yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan dilai A pada tahun 2022.
3. Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah dengan indikator kinerja persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam dokumen perencanaan yang merupakan sasaran kinerja baru di tahun 2023.
4. Meningkatnya inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks Inovasi daerah dengan nilai 51,62 di tahun 2022 dan nilai kematangan inovasi Bapedalitbang yang merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan di tahun 2023.

Tabel 2.2 (T.C-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja			-	-	43,20	45,00	-	-	-	-	Perubahan tahun 2023
2	Nilai RB Bapedalitbang			-	-	65 (B)	66 (B)	-	-	-	-	Perubahan tahun 2023
3	Nilai AKIP Bapedalitbang			A	A	A	A	A	A	-	-	
4	Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam			-	-	90,0%	90,0%	-	-	-	-	Perubahan tahun 2023
5	Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang			-	-	100	100	-	-	-	-	Perubahan tahun 2023
6	Indeks Inovasi Daerah			49,34	60,02	62,32	62,52	-	51,62	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun isu-isu penting di Bapedalitbang dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang koordinasi antar OPD secara horizontal maupun koordinasi Vertikal, dimana setiap tahun Bapedalitbang melaksanakan Sinkronisasi Program dan Rapat Kerja dengan pesertanya Dinas / Instansi Terkait di Kabupaten / Kota dan Propinsi .
- b. Pengelolaan Data yang belum maksimal
- c. Capaian program dan kegiatan yang tercantum dalam perencanaan belum maksimal
- d. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bapedalitbang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan.

Sebagai Perangkat Daerah yang diberi tugas sebagai perencanaan baik anggaran dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat tergantung dengan ketersediaan tenaga teknis, Dengan jumlah tenaga teknis sangat terbatas dikaitkan dengan rentang tugas-tugas yang sangat banyak dan padat serta mendesak, sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai perencanaan kurang maksimal.

- 2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
Sebagian tugas yang diberikan tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada, oleh sebab itu tugas yang diterima terkadang tidak cepat selesai dengan waktu perencanaan yang telah ditentukan. Dengan keterbatasan jumlah personil maka para personil di tuntut untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas agar tercapai perencanaan yang maksimal
- 3) Masih kurangnya kesempatan aparatur dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Peningkatan sumber daya aparatur harus ditingkatkan agar aparatur dapat meningkatkan kapasitas kerja dan sumber daya para aparatur demi pencapaian suatu perencanaan yang telah ditentukan.
- 4) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas data yang dibutuhkan untuk perencanaan.
Kualitas data yang dibutuhkan masih kurang akurat atau kurang bagus dari data yang akan dipergunakan dalam melakukan perencanaan
- 5) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan instansi terkait.
Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut koordinasi antar bidang dengan instansi- instansi yang terkait masih kurang. Dengan kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait maka pelaksanaan perencanaan tersebut tidak berjalan memadai.

e. Dampak

Keterbatasan dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai.

f. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Memaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan tupoksi, kekuatan dan kewenangan yang ada pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

- g. Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Bapedalitbang yaitu :
1. Optimalisasi pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.
 2. Optimalisasi sistem pendataan/informasi/data
 3. Pemantapan peran Bapedalitbang sebagai motivator, koordinator, komunikator serta administrator suatu perencanaan
 4. Peningkatan jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.
 5. Penyusunan SOP dan SPM
 6. Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK
 7. Peningkatan kematangan organisasi
 8. Peningkatan Digitalisasi dalam akuntabilitas kinerja

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2023 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai tabel berikut:

Tabel 2.3. (T-C.31) Review Rancangan Awal RKPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif		
BAPEDALITBANG					BAPEDALITBANG						
PERENCANAAN					PERENCANAAN						
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	22	dokumen	25.000.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	22	dokumen	25.000.000
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20	laporan	15.951.256	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20	laporan	15.951.256
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	504	orang/bulan	3.807.838.308	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	504	orang/bulan	3.807.838.308
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	dokumen	80.000.000	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	dokumen	80.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah						
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	15.000.000	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	15.000.000
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	paket	35.000.000	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	paket	35.000.000
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	25.000.000	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	25.000.000
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36	dokumen	11.000.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36	dokumen	11.000.000
- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	25.000.000	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	25.000.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	455.000.000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	455.000.000
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	dokumen	20.000.000	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	dokumen	20.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
- Pengadaan Mebel	Pesisir Selatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	unit	30.000.000	- Pengadaan Mebel	Pesisir Selatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	unit	30.000.000
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	unit	45.000.000	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	unit	45.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	100.000.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	100.000.000

BAPEDALITBANG – KAB. PESISIR SELATAN

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	250.000.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	250.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan				199.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan				199.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan - Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	60.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	70.000.000
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34	unit	29.000.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34	unit	29.000.000
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	40.000.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	40.000.000
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan				961.206.116	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan				961.206.116
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pesisir Selatan				884.169.544	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pesisir Selatan				884.169.544
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan - Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	dokumen	884.169.544	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan - Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	dokumen	884.169.544
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan				52.036.572	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan				52.036.572
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	40	dokumen	26.206.116	- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	40	dokumen	26.206.116
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	20	orang	25.830.456	- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	20	orang	25.830.456
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan				25.000.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan				25.000.000
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4	laporan	25.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4	laporan	25.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan				650.004.320	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan				650.004.320

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan				350.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan				350.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	2	laporan	30.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	2	laporan	30.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14	dokumen	70.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14	dokumen	70.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8	dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8	dokumen	50.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	3	laporan	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	3	laporan	200.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pesisir Selatan				151.150.270	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pesisir Selatan				151.150.270
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	23.774.230	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	23.774.230
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	laporan	51.873.220	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	laporan	51.873.220
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	23.774.230	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	23.774.230
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	laporan	51.728.590	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	laporan	51.728.590
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pesisir Selatan				148.854.050	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pesisir Selatan				148.854.050
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	36.553.440	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	36.553.440

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	laporan	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	laporan	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	laporan	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8	laporan	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan - Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1	laporan	95.058.540	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan - Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1	laporan	95.058.540
Koordinasi Penyusunan Dokumen - Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	17.242.070	Koordinasi Penyusunan Dokumen - Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	dokumen	17.242.070
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	laporan	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	laporan	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8	laporan	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8	laporan	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan - Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	1	laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan - Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	1	laporan	-
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					250.000.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					250.000.000
Penelitian dan Pengembangan Daerah					250.000.000	Penelitian dan Pengembangan Daerah					250.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pesisir Selatan				145.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pesisir Selatan				145.000.000
- Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Pesisir Selatan	Jumlah data Kelitbang dan peraturan yang dikelola dengan baik	2	laporan	145.000.000	- Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Pesisir Selatan	Jumlah data Kelitbang dan peraturan yang dikelola dengan baik	2	laporan	145.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pesisir Selatan				105.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pesisir Selatan				105.000.000
- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	dokumen	70.000.000	- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	dokumen	70.000.000
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbang	1	laporan	35.000.000	- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbang	1	laporan	35.000.000
BAPEDALITBANG					7.000.000.000	BAPEDALITBANG					7.000.000.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat nagari sampai ke tingkat kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut dapat diketahui berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Walaupun demikian Bapedalitbang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengakomodir usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah.

Dalam forum Musrenbang tersebut, tidak ada program ataupun kegiatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Bapedalitbang. dari tabel berikut dapat kita lihat Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 di Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan :

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Ket
	NIHIL				
Total					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam arahan kebijakan pembangunan nasional, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Dalam rancangan awal RKPD tersebut arah kebijakan pembangunan difokuskan pada (1) pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 , (2) Pencapaian sasaran pokok pembangunan berdasarkan RPJPD tahun 2005-2025 pada tahapan ke-4 dan (3) mendukung cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi daerah yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional, maka Bapedalitbang menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas “

B. Sasaran

Sasaran atau objektives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus

disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran yang ingin dicapai Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan, Kualitas dokumen perencanaan seperti RPJM, Renstra, Renja akan mampu mewujudkan sinergitas pembangunan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja yang lebih baik. Untuk itu dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, maka dalam penyusunan dokumen perencanaan keselarasan antar dokumen sangat diperlukan agar dalam penggunaan anggaran lebih efisien dan pencapaian kinerja yang lebih efektif.
 2. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja. Yaitu kebijakan pembangunan yang dievaluasikan, dilaksanakan berdasarkan permasalahan- permasalahan yang ditemui di daerah, perencanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga rekomendasi dari dewan riset daerah yang terdiri dari tenaga ahli berbagai bidang ilmu dari perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pembangunan
 3. Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah
 4. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
- Pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah perlu menjadi perhatian, karena dengan tercapainya kinerja sasaran strategis

Perangkat Daerah ini akan berkontribusi langsung pada pencapaian kinerja utama daerah khususnya pada sasaran strategis yang terdapat pada RPJMD yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsive, bersih dan bebas KKN dengan indikator sasaran opini BPK terhadap LKJ, Kualifikasi SAKIP, Skor Nilai LPPD dan Level maturitas SPIP. Pada pencapaian sasaran strategis ini tentu akan dipengaruhi beberapa hal antara lain kemampuan pelaksanaan kegiatan sinergitas program kegiatan Perangkat Daerah.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang masih berpedoman pada Renstra Bapedalitbang 2021-2026, selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada kegiatan tahun yang sudah berlalu dan sasaran RPJPD tahapan ke-4. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta rencana tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Bapedalitbang tahun 2024 serta Prakiraan Maju Rencana program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Bapedalitbang tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						7.000.000.000,00							7.431.500.000,00	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.000.000.000,00							7.431.500.000,00	
	01	PERENCANAAN						6.750.000.000,00							7.236.500.000,00	
1	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.138.789.564,00							5.800.000.000,00	
	5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.951.256,00							135.000.000,00	
	5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24 Laporan	15.951.256,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.887.838.308,00							4.380.000.000,00	
	5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					36 Orang/bulan	3.807.838.308,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						586.000.000,00							475.000.000,00	
	5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	15.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	35.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					36 Dokumen	11.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	455.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						75.000.000,00							135.000.000,00	
	5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	30.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	45.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	350.000.000,00	-	-	-	-	-	430.000.000,00	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	199.000.000,00	-	-	-	-	-	245.000.000,00	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	60.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	70.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		34 Unit	29.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	40.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja		26-	961.206.116,00	-	-	-	-	-	835.000.000,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang dihasilkan		2 dokumen	884.169.544,00	-	-	-	-	-	550.000.000,00	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		11 Dokumen	884.169.544,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan elemen data untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah		100 %	52.036.572,00	-	-	-	-	-	85.000.000,00	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		40 Dokumen	26.206.116,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		20 Orang	25.830.456,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	80.000.000,00	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		0 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		0 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	120.000.000,00	

5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	25.000.000,00	-		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						650.004.320,00							601.500.000,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						350.000.000,00							216.500.000,00	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	0,00	-	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				5 Laporan	0,00	-	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	0,00	-	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	30.000.000,00		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	70.000.000,00		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	0,00	-	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	50.000.000,00		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	200.000.000,00		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						151.150.270,00							175.000.000,00	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	23.774.230,00		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	0,00	-	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	0,00	-	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	51.873.220,00		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	23.774.230,00		Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKKP/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	51.728.590,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	-					148.854.050,00						210.000.000,00	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKKP)				1 Dokumen	36.553.440,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKKP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	95.058.540,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKKP)				1 Dokumen	17.242.070,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah				1 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah				1 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKKP/RPJMD pada Bidang Wilayah				1 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						250.000.000,00						195.000.000,00	
4	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						250.000.000,00						195.000.000,00	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						145.000.000,00						60.000.000,00	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	145.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi						105.000.000,00						135.000.000,00	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang				1 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
J U M L A H											7.000.000.000,00						7.431.500.000,00	

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 2 urusan yakni 1.) Urusan Penelitian, Pengembangan dan 2.) Urusan Perencanaan. Rencana Kerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta indikatornya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventerisasi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangingan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan

dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dalam Rencana Kerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 terdapat 4 Program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Kerja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana Kerja Satuan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Tahun 2024			
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
Kabupaten Pesisir Selatan			
No.	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		BAPEDALITBANG	7.000.000.000
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.000.000.000
	5.01.	Urusan : PERENCANAAN	6.750.000.000
	5.01.01.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.138.789.564
	5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.951.256
	5.01.01.2.01.01.	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000
	5.01.01.2.01.07.	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.951.256
	5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.887.838.308
	5.01.01.2.02.01.	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.807.838.308
	5.01.01.2.02.02.	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000
	5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.000.000
	5.01.01.2.06.01.	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
	5.01.01.2.06.04.	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000
	5.01.01.2.06.05.	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000
	5.01.01.2.06.06.	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000
	5.01.01.2.06.08.	- Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000
	5.01.01.2.06.09.	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	455.000.000
	5.01.01.2.06.10.	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000
	5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000
	5.01.01.2.07.05.	- Pengadaan Mebel	30.000.000
	5.01.01.2.07.06.	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000
	5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.000.000
	5.01.01.2.08.02.	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000
	5.01.01.2.08.04.	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000
	5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.000.000
	5.01.01.2.09.01.	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	60.000.000
	5.01.01.2.09.02.	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000
	5.01.01.2.09.06.	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.000.000
	5.01.01.2.09.09.	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000
	5.01.02.	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	961.206.116
	5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	884.169.544
	5.01.02.2.01.07.	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	884.169.544
	5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	52.036.572
	5.01.02.2.02.01.	- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	26.206.116
	5.01.02.2.02.02.	- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	25.830.456

5.01.02.2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	25.000.000
5.01.02.2.04.03	-	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	25.000.000
5. 01. 03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	650.004.320
5. 01. 03. 2.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	350.000.000
5. 01. 03. 2.01. 04.	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000
5. 01. 03. 2.01. 05.	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.000.000
5. 01. 03. 2.01. 07.	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.000.000
5. 01. 03. 2.01. 08.	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.000.000
5. 01. 03. 2.02.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	151.150.270
5. 01. 03. 2.02. 01.	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.774.230
5. 01. 03. 2.02. 04.	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	51.873.220
5. 01. 03. 2.02. 05.	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.774.230
5. 01. 03. 2.02. 08.	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	51.728.590
5. 01. 03. 2.03.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	148.854.050
5. 01. 03. 2.03. 01.	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36.553.440
5. 01. 03. 2.03. 04.	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	95.058.540
5. 01. 03. 2.03. 05.	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.242.070
5. 05.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	250.000.000
5. 05. 02.		Penelitian dan Pengembangan Daerah	250.000.000
5. 05. 02. 2.01.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	145.000.000
5. 05. 02. 2.01. 12.	-	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	145.000.000
5. 05. 02. 2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	105.000.000
5. 05. 02. 2.04. 01.	-	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	70.000.000
5. 05. 02. 2.04. 04.	-	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	35.000.000
		BAPEDALITBANG	7.000.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2021–2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD adalah sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a Garuda (Indonesian national emblem) in the center, flanked by two stars. The text "BUPATI PESIR SELATAN" is written around the top inner edge, and "PESIR SELATAN" is written around the bottom inner edge.
BUPATI PESIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR